

Melawi Masih Menyisakan Opini Buruk BPK

Pengawasan DPRD Dinilai Tak Optimal

Eko Susilo
Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Salah satu fungsi penting dari DPRD ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan tujuan, apa yang menjadi visi dan misi daerah dapat terwujud dengan baik. Namun sayangnya, masyarakat menilai fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga Legislatif selama ini terhadap pembangunan di Melawi kurang begitu optimal. Ada apa dengan wakil rakyat di Negeri Juang?

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil pekerjaan proyek di Melawi yang kurang memuaskan di mata publik. Belum lagi, masalah opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Melawi setiap tahunnya yang berkuat pada Disclaimer Opinion atau tidak wajar. Merupakan salah satu bukti, bahwa pengawasan DPRD terhadap kinerja aparat pemerintah Melawi masih

sangat lemah dan jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

"Pengawasan menjadi salah satu fungsi legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan, sebagai upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Masa sejak Melawi berdiri, LHP BPK selalu Disclaimer Opinion terus. Apakah kita tidak malu dengan daerah lain," ungkap Beni Rahmad, salah seorang warga Melawi, kepada Borneo Tribune, Jumat (29/3).

Ia percaya, sebenarnya Kabupaten Melawi mampu keluar dari opini buruk BPK selama ini terhadap laporan keuangan daerah. Asalkan, fungsi pengawasan semua pihak berjalan dengan maksimal, baik ditingkat Legislatif maupun Kepala Daerah.

"Kita kerap mendengar, saat ada kabar BPK mau datang ke Melawi. Sejumlah instansi pemerintah

mulai kasak-kusuk melengkapi administrasi laporan keuangannya. Padahal, jika dalam pengelolaan anggaran daerah dipergunakan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, hal itu pasti tidak akan terjadi," ujar Beni.

Oleh karena itu, menurut pria ramah ini DPRD dalam melakukan pengawasan sangatlah penting. Selain itu pula, pengawasan yang dilakukan juga perlu dipikirkan bagaimana caranya mengefektifkan sepenuhnya fungsi pengawasan legislatif.

"Menjalankan fungsi pengawasan harus benar-benar berkualitas. Misalnya, melakukan pengawasan yang bersikap preventif, mencegah kesalahan yang sama berulang kembali dan yang bersifat korektif atau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Jika itu dilakukan, saya yakin Melawi bisa keluar dari Disclaimer Opinion," terangnya.

Ia mencontohkan, pengawasan tersebut seperti terhadap pelaksanaan

Perda, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemda dalam melaksanakan program pembangunan melalui fraksi, komisi dan alat kelengkapan lainnya.

"Selama ini kita melihat, pengawasan yang dilakukan belum terlalu menyentuh kepada itu semua. Buktinya, ya dari LHP BPK itu sendiri, yang kita terima setiap tahunnya," timpal Beni.

Menurutnya, pengawasan APBD yang dilaksanakan legislatif selama ini lebih mengarah pada pengendalian untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

"Kita sebagai masyarakat mau lihat, apakah para wakil rakyat yang telah dipilih pada saat Pemilu legislatif lalu, benar-benar berkualitas dan berani dalam mengoreksi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. Karena berpikir kritis untuk membangun daerah agar lebih baik merupakan tanggung jawab kita semua," pungkas Beni. □